

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sampah merupakan salah satu tugas dasar pemerintah yang hingga saat ini belum dapat terselesaikan dengan baik.¹ Berbagai upaya telah dikerahkan oleh pemerintah guna mendorong pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan dapat bernilai guna melalui prinsip R3 (*reduce, reuse, recycle*). Salah satu sampah yang sangat mengkhawatirkan adalah sampah laut yaitu sampah yang tidak dikelola dengan baik di daratan sehingga terbawa dan berakhir di laut. Sampah laut menjadi salah satu tantangan besar untuk negara berkembang, khususnya Indonesia, dengan garis pantai yang panjang dan ketergantungan pada sumber daya laut, kita menjadi lebih terancam terhadap dampak buruk yang diakibatkan oleh sampah laut. Faktor sistem pengelolaan sampah yang belum memadai merupakan salah satu faktor yang memperparah keadaan kebersihan lautan Indonesia,² sehingga hal ini masih menjadi tugas penting agar segera dibenahi oleh pemerintah.

Sebagai respons terhadap isu ini, presiden Joko Widodo pada tahun 2018 mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut yang mana di dalamnya juga terdapat dokumen Rencana Aksi

¹ Olukanni, D.O.; Nwafor, C.O. Public-Private Sector Involvement in Providing Efficient Solid Waste Management Services in Nigeria. *Recycling* **2019**, *4*, 19

² R. Lalitha S. Fernando. 2018. Solid waste management of local governments in the Western Province of Sri Lanka: An implementation analysis. Elsevier; Waste Management 84194-203

Nasional Penanganan Sampah Laut (RAN PSL) yang menjadi arahan bagi instansi pemerintah serta acuan untuk masyarakat dan pelaku usaha³. Peraturan ini dikeluarkan sebagai upaya pemerintah untuk menekankan pentingnya pengelolaan sampah laut dan pentingnya kolaborasi antar semua pihak dalam penanganan dan mengelola sampah laut agar mengurangi jumlah sampah laut yang tersebar.

Kelalaian dalam pengelolaan sampah laut ini mengakibatkan permasalahan pada lingkungan perairan Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah sampah laut tertinggi di dunia.⁴ Seperti yang di sampaikan oleh mantan menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti⁵, bahwa Indonesia merupakan negara penyumbang plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Laporan terakhir per tahun 2024 Indonesia berada di posisi kelima di dunia, di bawah Filipina sebagai peringkat satu, India peringkat dua, Malaysia peringkat tiga, dan Cina peringkat empat serta dilanjudi Myanmar di peringkat enam dan Brazil di peringkat ketujuh.⁶ Walaupun begitu, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Indonesia dalam mencegah dan mengelola sampah agar tidak berakhir di laut masih belum optimal. Sebagai negara dengan garis pantai yang sangat besar, isu pengelolaan kebersihan laut merupakan hal yang harus diperlakukan dengan serius.

³ Mutia Riksfardini, Qiqi Asmara. 2023. "Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Laut Di Wilayah Pesisir Muara Angke Jakarta Utara". Vol. 1 No. 2

⁴ Cahyani, Ferina. Jaya, Belardo. Wijaya, Dani. 2023. Marine Waste Management Policy As An Effort To Prevent Environmental Pollution And Sustainability Of Marine Ecosystems: Indonesia Perspective. Jurnal Legalitas Volume 16 Issue 2

⁵ <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/867/menenggelamkan-pembuang-sampah-plastik-di-laut?lang=1>

⁶ Ukpanah, Inemesit "Ocean Pollution: A Deep Dive into Current Statistics and Trends" Diakses dari <https://www.greenmatch.co.uk/ocean-pollution-facts>

Sebagai bentuk komitmen terhadap usaha menurunkan 70 persen sampah laut Indonesia di tahun 2025, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong pelaksanaan program gerakan bersih pantai dan laut⁷. Nantinya program ini diperluas dan menjadi gerakan nasional Bulan Cinta Laut (BCL) yang mana memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap kebersihan laut dengan cara aksi bersih pantai dan laut, mengatur limbah kapal agar tidak dibuat langsung ke laut, dan kegiatan nelayan untuk mengumpulkan sampah yang ada di laut. Permasalahan sampah laut merupakan masalah yang kompleks sehingga tidak dapat diselesaikan apabila hanya bergantung pada upaya dari pemerintah. Tata kelola yang baik serta responsif menjadi sebuah keharusan guna menjamin keberhasilan penyelesaian masalah ini dengan mengedepankan aspek kerja sama antar berbagai pihak. Kolaborasi antar setiap pihak dalam menangani masalah sampah laut merupakan sebuah keharusan demi terciptanya daerah pantai yang bebas dari sampah.

Menurut *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA),⁸ sampah laut didefinisikan sebagai bahan padat yang dimanufaktur atau diproses di darat yang secara sengaja atau tidak sengaja dibuang ke laut atau aliran sungai. Segala benda padat yang diciptakan manusia dapat menjadi sampah laut apabila ditinggalkan di lingkungan perairan. Sedangkan menurut *United Nations Office for*

⁷ Khoirunnisaa, Jihaan "Kkp Punya Program BCL Untuk Kurangi Sampah di Laut: Apa Tuh" Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5939885/kkp-punya-program-bcl-untuk-kurangi-sampah-di-laut-apa-tuh>

⁸ NOAA. "What is Marine Debris?" <https://marinedebris.noaa.gov/discover-marine-debris/what-marine-debris>

Disaster Risk Reduction (UNDRR),⁹ sampah laut adalah segala benda padat yang dibuang atau ditinggalkan di lingkungan perairan yang terdiri dari benda-benda yang dibuat atau digunakan oleh manusia. Sampah tersebut dibuang langsung ke laut, ke pantai, dibuang melalui aliran sungai, atau sampah yang terbawa secara tidak sengaja akibat cuaca buruk. Sedangkan menurut Peraturan Presiden no 83 tahun 2018, sampah laut adalah sampah yang berasal dari daratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan di laut. Beberapa bentuk sampah laut tersebut adalah sampah organik, sampah logam, sampah tekstil, dan sampah plastik.

Sampah laut sangat berpengaruh terhadap peningkatan polusi laut. Dampak dari sampah laut berpengaruh terhadap sektor ekonomi dan pariwisata, serta mencakup ekosistem laut dan kesehatan masyarakat. Pengaruh sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan sampah tersebut terurai dan menciptakan mikro plastik, yang mana menjadi penyebab kerusakan ekosistem laut dan dapat dikonsumsi oleh ikan. Hal ini akan berdampak pada jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat

Dalam mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik maka diperlukan kerja sama antar berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.¹⁰ Pemerintah tidak lagi menjalankan peran secara dominan, melainkan meningkatkan kontribusi dari pemangku kepentingan yang ada tersebut. Pelaksanaan kerja sama ini akan menghasilkan usaha kolaborasi

⁹ UNDRR "Marine Debris" <https://www.undrr.org/understanding-disaster-risk/terminology/hips/tl0040>

¹⁰ Andi Ni'mah Sulfiani. 2021. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governancedalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo". *Jurnal Administrasi Publik* Volume XVII (1)

dalam penyelesaian masalah sampah laut yang tengah di hadapi oleh Indonesia. Kolaborasi antar pihak dalam upaya menyelesaikan permasalahan sampah laut sangat penting, mengingat kondisi pada saat sekarang ini. Dalam upaya untuk melihat perkembangan sampah laut, perlu adanya sebaran data timbulan sampah secara umum di provinsi Sumatra Barat

Tabel 1.1. Timbulan Sampah Provinsi Sumatra Barat

Tahun	Provinsi	Timbulan Sampah Harian (Ton)	Timbulan Sampah Tahunan (Ton)
2024	Sumatra Barat	2,187.48	798,430.66
2023	Sumatra Barat	2,373.05	866,161.92
2022	Sumatra Barat	2,625.30	958,235.32

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

Penjabaran di atas menunjukkan perubahan timbulan sampah harian dan tahunan yang dihasilkan provinsi Sumatra Barat. Dari data tersebut, kota Padang merupakan kontributor besar setiap tahunnya pada jumlah timbulan sampah harian dan juga timbulan sampah tahunan dilanjuti oleh kabupaten Agam, dan kabupaten Padang Pariaman. Tentunya jumlah timbulan kota Padang tidak lepas dari adanya intensitas penduduk yang terpusat di kota Padang sebagai ibu kota provinsi Sumatra Barat. Hal ini juga menunjukkan bahwa perlunya upaya serius untuk mengurangi timbulan sampah agar tidak menjadi masalah berkepanjangan.

Tabel 1.2. Timbulan Sampah Kota Padang

Tahun	Provinsi	Kota	Timbulan Sampah Harian (Ton)	Timbulan Sampah Tahunan (Ton)
2024	Sumatra Barat	Padang	629.70	229,840.56
2023	Sumatra Barat	Padang	647.39	236,296.62
2022	Sumatra Barat	Padang	643.76	234,973.13

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

Penjelasan di atas menunjukkan kisaran jumlah timbulan sampah pada kota Padang setiap hari. Terdapat sedikit fluktuasi dari tahun ke tahun dalam jumlah timbulan sampah yang menarik untuk diamati. Dengan jumlah sampah yang besar tersebut, sangat disayangkan bahwa 30 persen dari total timbulan sampah harian tersebut berakhir di laut.¹¹ Itu berarti sekitar 180 ton sampah dari darat hanyut melalui sungai ke laut lepas. Angka ini termasuk besar mengingat sampah yang telah hanyut ke laut lepas akan lebih susah untuk dikelola, sehingga perlu adanya program dan tindakan lebih untuk membersihkan sampah ini. Keadaan ini sangat berbahaya karena kebocoran sampah laut mengakibatkan sampah anorganik yang sangat susah terurai dengan alami memasuki perairan kota Padang.

Penelitian mengenai *collaborative governance* dalam menyikapi permasalahan sampah telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Seperti yang

¹¹ Zulfikar, Muhammad. "BPSPL sebut ada kebocoran sampah ke laut lepas hingga 30 persen" Diakses dari <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/619683/bpspl-sebut-ada-kebocoran-sampah-ke-laut-lepas-hingga-30-persen#:~:text=Fajar%20menyebutkan%20setiap%20harinya%20Ranah,30%20persennya%20bermuara%20ke%20laut.>

dilakukan oleh Jeanne Steza Ryna Sianturi dan Kus Indarto¹², yang membahas tentang *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah melalui program Salin Swara. Penelitian selanjutnya oleh Fatimah Kartika Ningrum dkk. Membahas tentang *collaborative process* pada program desa mandiri sampah di kabupaten Jepara¹³. Selanjutnya, Tri Oktavia Ulya juga melakukan penelitian tentang *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di pantai Teluk Penyau di kabupaten Cilacap.¹⁴

Dari berbagai penelitian tersebut, penelitian mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah laut belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Peneliti belum melihat adanya penelitian yang menjabarkan urgensi pengelolaan sampah laut secara optimal serta pentingnya kolaborasi antar elemen pemerintahan dengan konsep *collaborative governance* yang membahas tentang pengelolaan sampah laut. Sehingga hal ini menjadi kebaruan dalam penelitian yang hendak peneliti amati.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan sampah laut merupakan salah satu masalah besar bagi Indonesia, termasuk kota Padang. Kepala Badan Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Laut menyatakan bahwa total sampah yang di produksi kota Padang mencapai

¹² Jeanne Steza Ryna Sianturi dan Kus Indarto. 2024. Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Salin Swara di Kota Bontang. Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKA). Volume 4 Nomor 1

¹³ F.K. Ningrum, dkk.. 2024. Collaborative Governance Process Pada Program Desa Mandiri Sampah Di Desa Keling Kabupaten Jepara. Journal of Politic and Government Studies, vol. 13, no. 4

¹⁴ Oktavia Ulya, T., Rina Herawati, A., & Subowo, A. (2024). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Pantai Teluk Penyau Kabupaten Cilacap. Journal of Public Policy and Management Review, 13(3), 1284-1296

400-600 ton per hari dan 30 persen dari angka tersebut mengalami kebocoran hingga masuk ke laut.¹⁵ Hal ini berdampak kepada banyak hal seperti perusakan ekosistem laut berupa terganggunya habitat ikan dan biota lainnya yang ada di perairan kota Padang. Selain itu sektor kesehatan masyarakat juga akan terkena dampak ini karena sampah anorganik yang bocor ke laut memiliki potensi untuk dimakan oleh ikan, sehingga ikan hasil tangkapan nelayan mengandung mikro plastik dan tidak aman untuk konsumsi. Hal ini sesuai dengan hasil temuan sekelompok peneliti dari Universitas Negeri Padang menunjukkan bahwa sebagian besar ikan yang di jual di pasar-pasar kota Padang telah terkontaminasi oleh mikro plastik di beberapa organnya.¹⁶ Mengingat itu perlu adanya observasi awal oleh peneliti terhadap kondisi di lapangan.



Sumber: data primer diambil oleh peneliti

¹⁵ Hendra, Muhammad Noli. "Wujudkan Ekonomi Biru Dari Gerakan Bulan Cinta Laut di Padang" Diakses dari <https://sumatra.bisnis.com/read/20240711/533/1781535/wujudkan-ekonomi-biru-dari-gerakan-bulan-cinta-laut-di-padang>

¹⁶ Efison, Hendra "Tim PKM RE Departemen Biologi UNP Temukan Cemaran Mikroplastik Pada Ikan Konsumsi di Kota Padang" Diakses dari <https://padek.jawapos.com/kesehatan/2364837049/tim-pkm-re-departemen-biologi-unp-temukan-cemaran-mikroplastik-pada-ikan-konsumsi-di-kota-padang>

Gambar 1.1 Nelayan Memilah Ikan dan Sampah dari Jaring Tangkapan

Kelompok nelayan yang tinggal dan bergantung besar pada perairan kota Padang merupakan kelompok rentan yang sangat terancam bahaya imbas dari masalah sampah laut ini. Dari hasil observasi dan temuan awal peneliti kondisi nelayan pada sekitaran pantai kota Padang sangat memprihatinkan. Nelayan yang telah menghabiskan tenaga dan waktu dalam menyebar dan menarik jaring hanya mendapat sedikit ikan dari hasil tangkapannya dan selebihnya merupakan sampah plastik, kayu dan ranting, dan juga sampah lainnya yang terjerat pada jaring. Ini membenarkan temuan peneliti dari Universitas Negeri Padang sebelumnya, bahwa ikan di perairan kota Padang kemungkinan besar telah mengonsumsi serpihan sampah dan mengandung mikro plastik.

Kesehatan masyarakat juga dapat terganggu apabila permasalahan sampah laut dibiarkan dan tidak dikelola sehingga dibiarkan menumpuk. Tumpukan sampah laut ini akan menjadi tempat rawannya timbul penyakit serta menyebabkan bau yang tidak enak bagi masyarakat yang tinggal di sekitaran pesisir. Kota Padang sebagai kota pantai juga akan mengalami kesusahan di saat daerah pantai sudah sangat kotor akibat adanya timbunan sampah laut. Kondisi pantai yang tidak bersih akan menjadi faktor penghambat berkembangnya sektor pariwisata lokal dan internasional sehingga akan mengurangi penghasilan daerah.



Sumber: data primer diambil oleh peneliti

Gambar 1.2 Kondisi Pantai Padang yang Dipenuhi Sampah Laut

Masalah ini tidak hanya berdampak kepada kesehatan dan ekonomi saja, imbas kepada sektor pariwisata juga termasuk salah satu pengaruh dari permasalahan ini. Berbagai wisatawan yang datang berkunjung ke kawasan pantai kota Padang mengakui bahwa sampah laut tersebut sangat mengganggu bagi pengunjung pantai.¹⁷ Penyebab sampah tersebut menumpuk ialah hasil perbuatan masyarakat yang membuang sampah melalui sungai dan akibat cuaca hujan deras yang terjadi, sehingga sampah yang tadinya terkumpul di palung laut kembali hanyut ke pantai.

Pencemaran yang diakibatkan oleh sampah laut merupakan dampak dari gagalnya tata kelola sampah di darat sehingga permasalahan tersebut terbawa ke laut. Selain itu kesadaran pemilahan sampah masih tergolong rendah di masyarakat. Pola pemungutan, pengangkutan, dan pembuangan tetap menjadi pendekatan

¹⁷ Sastra, Yosra "Wisatawan Keluhkan Tumpukan Sampah di Pantai Padang" Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/04/28/wisatawan-keluhkan-tumpukan-sampah-di-pantai-padang-dekat-masjid-al-hakim>

pengelolaan sampah yang dilaksanakan di Indonesia. Sedangkan keinginan untuk memilah sampah secara pribadi masih rendah di kalangan masyarakat. Kesadaran dalam pemilahan sampah ini harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dari hulu ke hilir, mulai dari tingkat individu dimana sampah dapat dipilah dan hingga dibuang sesuai dengan klasifikasi sampah tanpa bercampur.¹⁸ Akan tetapi, pada saat sekarang aspek ini masih belum dibenahi sehingga permasalahan sampah laut tetap tidak mampu diatasi dengan baik.

Peran pemimpin yang dilengkapi keseriusan serta komunikasi dengan pemangku kepentingan yang ada melalui perencanaan yang mumpuni dapat membantu penyelesaian masalah sampah laut kota Padang. Penyelesaian masalah ini dapat tercapai melalui kolaborasi oleh *stakeholder* yang sedang terlaksana di tengah situasi saat ini. Sebagai bentuk upaya pengelolaan sampah laut oleh pemerintah, berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) digerakkan untuk membantu penyelesaian masalah ini. Pengumpulan sampah yang dipungut dari laut kemudian dipindahkan ke bank sampah ataupun industri untuk dipilah dan diolah menjadi bahan baku alternatif.

Penyelesaian permasalahan sampah laut kota Padang sangat membutuhkan peran pemerintah sebagai regulator dan aktor penting. Sehingga Upaya pemerintah dapat dilihat sebagai salah satu syarat penting dari keberhasilan penanganan masalah. Upaya pemerintah kota Padang dalam menangani permasalahan sampah laut terlihat dalam berbagai program yang dijalankan. Salah satu program tersebut

¹⁸ Ferina Ardhi Cahyani, Belardo Prasetya Mega Jaya, Dani Wijaya. 2023. Marine Waste Management Policy as an Effort to Prevent Environmental Pollution And Sustainability Of Marine Ecosystems: Indonesia Perspective. Jurnal Legalitas Volume 16 Issue 2

adalah program Padang Bagoro yang dimulai sejak 17 Juli 2022 yaitu program gotong royong yang dilaksanakan secara bersama-sama guna membersihkan lingkungan dari sampah yang menumpuk.¹⁹ Dalam pelaksanaan program ini Sungai Batang Arau sempat menjadi salah satu tempat pelaksanaan gotong royong dikarenakan banyaknya sampah yang tersangkut atau tertimbun di sekitarnya. Untuk mencegah sampah tersebut berakhir ke laut, wali kota Hendri Septa juga akan memasang jaring pada sungai tersebut agar untuk mencegah sampah berakhir di laut lepas.

Upaya pemerintah lainnya dalam mencegah sampah agar tidak hanyut hingga ke laut lepas adalah melalui mendorong pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir. Bentuk pengelolaan sampah dari hulu menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup kota Padang, Mairizon, adalah pembuatan bank sampah.²⁰ Pada tahun 2024, jumlah bank sampah yang ada di kota Padang mencapai 180 unit tersebar di seluruh penjuru kota Padang.²¹ Pelaksanaan program bank sampah dapat membantu mencegah permasalahan sampah yang tidak bertanggung jawab dan menghindari sampah dibuang ke sungai sekitar. Pelaksanaan program bank sampah juga sangat bergantung dengan sosialisasi dan keikutsertaan oleh masyarakat.

Selain upaya dari hulu atau dari sumber, upaya hilir juga dilaksanakan oleh pemerintah. Bentuk upaya ini berupa pemasangan kubus apung di beberapa induk

¹⁹ Langgam.id "Program Padang Bergoro, Wako Hendri Septa: Sungai Bukan Tempat Buang Sampah" Diakses dari <https://langgam.id/program-padang-bergoro-wako-hendri-septa-sungai-bukan-tempat-buang-sampah/>

²⁰ infopublik.id "Kadis DLH: Pengelolaan Sampah di Padang dari Hulu ke Hilir" Diakses dari <https://infopublik.id/kategori/nusantara/566663/kadis-dlh-pengelolaan-sampah-di-padang-dari-hulu-ke-hilir>

²¹ Putri, Widi Dwi "Pemko Padang Gencarkan Keterlibatan ASN di Bank Sampah" Diakses dari <https://www.rri.co.id/daerah/818332/pemko-padang-gencarkan-keterlibatan-asn-di-bank-sampah>

sungai yang terhubung ke laut lepas di kota Padang.²² Pemasangan kubus apung ini merupakan tindakan preventif agar sampah yang dibuang secara sembarangan dapat dicegah dan tidak hanyut ke laut. Upaya pengelolaan sampah dari hulu ke hilir sangat penting untuk mencegah naiknya jumlah sampah laut yang susah dikelola. Kedua usaha ini harus jalan beriringan dan berkelanjutan dengan adanya keikutsertaan oleh setiap pemangku kepentingan.

Sebagai OPD yang bertanggungjawab atas masalah sampah, Dinas Lingkungan Hidup kota Padang juga melaksanakan berbagai kegiatan bersih-bersih sampah laut di sekitaran pantai padang.²³ Muaro Pantai Padang merupakan tujuan wisata bahari yang sangat penting bagi masyarakat dan pendatang, sehingga kebersihan pantai ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk ditangani. Penyebab sampah menjadi banyak sering kali dikarenakan masyarakat membuang sampah sembarangan ke sungai dan tidak optimalnya upaya pencegahan sehingga pada saat hujan lebat sampah tersebut terbawa ke pantai. Sampah yang terbawa tersebut akan mengendap di tepi pantai dan menjadi tumpukan sampah. Kegiatan bersih pantai oleh Dinas Lingkungan Hidup belum memiliki jadwal tetap dan bersifat reaktif apabila terjadi hujan lebat atau adanya laporan tumpukan sampah oleh masyarakat.

Dalam menangani permasalahan sampah terutama pada Kawasan pantai padang, Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dalam

²² Infopublik.id "DLH Padang: Pengelolaan Sampah dari Hulu ke Hilir" Diakses dari <https://infopublik.id/kategori/nusantara/736135/dlh-padang-pengelolaan-sampah-dari-hulu-ke-hilir?show=>

²³ Maulina. "Petugas DLH Bersihkan Sampah di Pantai Padang" Diakses dari <https://www.rri.co.id/padang/daerah/733765/petugas-dlh-bersihkan-sampah-di-pantai-padang>

menjaga kebersihan tujuan wisata kota Padang. Kolaborasi ini terbentuk akibat adanya kepentingan bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan dan menjalankan tugas masing-masing OPD. Dinas pariwisata bertanggungjawab terhadap kebersihan pada kawasan pantai yang merupakan tujuan wisata dan dinas lingkungan hidup bertanggungjawab secara menyeluruh atas kebersihan kota Padang. Kegiatan bersih pantai juga dilaksanakan secara berkala oleh instansi dan lembaga pemerintah lainnya sebagai bentuk kepedulian tanpa ada jadwal tetap.

Selain peran pemerintah, peran perusahaan sangat dibutuhkan agar proses *collaborative governance* dapat berjalan dengan baik. Bentuk kolaborasi terhadap tujuan sama dari pemerintah dan pihak usaha mempermudah penyelesaian masalah sampah laut yang ada. Kolaborasi oleh perusahaan dalam urusan pengelolaan sampah dilaksanakan dalam beberapa bentuk. Salah satu bentuk kolaborasi yang dilaksanakan oleh Perusahaan adalah bantuan melalui penyerahan kontainer sampah oleh PT Semen Padang kepada Dinas Lingkungan Hidup kota Padang.²⁴ Bantuan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kontainer sampah yang diperlukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk membantu masyarakat membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan dan mengurangi pembuangan sampah secara sembarangan.

Bentuk lain kolaborasi perusahaan dalam menangani dan mengelola sampah laut berupa program Nabuang Sarok yang dilaksanakan oleh PT Semen Padang. Program ini diluncurkan pada 5 Juli 2022 dan bertujuan untuk mengajak nelayan

²⁴ posmetropadang.co.id "PT Semen Padang Serahkan Bantuan 1 Unit Kontainer Sampah ke DLH" Diakses dari <https://posmetropadang.co.id/metro-padang/271240/pt-semen-padang-serahkan-bantuan-1-unit-kontainer-sampah-ke-dlh/>

dan masyarakat untuk mengumpulkan sampah plastik ataupun sampah laut lainnya dan diserahkan kepada PT Semen Padang agar digunakan sebagai bahan bakar dalam produksi semen melalui penggunaan pengoptimalan bahan baku dan alternatif bahan bakar. Kontributor yang menyerahkan sampah akan mendapat poin yang dapat ditukarkan menjadi berbagai barang yang disediakan oleh perusahaan. Hal ini membantu mendorong masyarakat dalam menangani permasalahan sampah yang ada serta memberi hadiah materiil bagi mereka yang berhasil berkontribusi dalam usaha membersihkan sampah.

Perusahaan PT Pegadaian juga ikut serta dalam membantu menyelesaikan permasalahan sampah laut. Pegadaian telah aktif mengelola dan membina bank sampah yang ada di kota Padang sejak tahun 2018. Salah satu bank sampah pegadaian ini terletak pada kawasan tepi pantai Padang, diresmikan dengan nama bank sampah kampung nelayan cinta laut.²⁵ Peran pegadaian tidak hanya dalam pembinaan bank sampah saja, program *the Gade Clean and Gold* juga termasuk sebagai usaha pegadaian untuk mengajak masyarakat dalam menjaga lingkungan. Pegadaian ikut serta menerapkan ekonomi sirkular dalam upaya penyelesaian permasalahan sampah terutama sampah laut melalui program ini. Program ini dilaksanakan oleh masyarakat dengan cara memilah sampah dan menyetorkannya ke bank sampah yang ada. Setiap sampah yang dijual nantinya dapat ditabung

²⁵ Deswita, Yeti "Ajak Nelayan Pilah Sampah Menabung Emas, Pegadaian Dukung BCL" Diakses dari <https://www.harianhaluan.com/news/pr-105350892/ajak-nelayan-pilah-sampah-menabung-emas-pegadaian-dukung-bcl>

menjadi tabungan emas dan dapat menjadi harta materiil lainnya yang bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat.²⁶

Masyarakat dalam konsep *collaborative governance* tidak lagi hanya menjadi objek dari tata kelola pemerintahan yang hanya dipengaruhi oleh program dan kebijakan, tapi juga ikut mengambil peran langsung dalam menyikapi masalah publik tersebut. Masyarakat memiliki peran penting dalam penyelesaian permasalahan sampah, keberhasilan pengelolaan dan penanganan permasalahan sampah laut ditentukan oleh keikutsertaan dan kepatuhan masyarakat dalam membuang dan memproses sampah yang mereka miliki. Melalui program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, program Bulan Cinta Laut (BCL) dilaksanakan setiap tahun dan mengikut sertakan masyarakat sekitar pantai dan nelayan. Program ini mengajak masyarakat untuk mengambil sampah yang mengapung dilaut lalu dibawa ke daratan agar dapat dipilah dan dikelola. Peran aktif masyarakat dalam mengikuti kegiatan ini membantu mengurangi sampah laut yang tersebar dan mengapung di laut lepas sekitar pantai Padang.

Kelompok masyarakat yang tergabung dalam *non governmental organisation (NGO)* juga aktif melakukan kegiatan dalam melindungi laut kota Padang. Salah satunya yaitu organisasi Kejar Mimpi Padang yang melaksanakan aksi sosial pembersihan pantai dengan tema "Pekan Lautan Hijau".²⁷ Kegiatan ini didasari keresahan terhadap banyaknya jumlah sampah di laut dan rendahnya upaya

²⁶ Sridarni. Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Bank Sampah Diakses dari <https://www.rri.co.id/padang/daerah/245458/memberdayakan-ekonomi-masyarakat-melalui-program-bank-sampah>

²⁷ Chalid, dan Indri "Aksi Bersih Pantai Pasir Jambak: Kejar Mimpi Padang Wujudkan Lautan Hijau!" Diakses dari <https://detakalinea.fisip.unand.ac.id/index.php/joomlart-content/list-all>

pengelolaan permasalahan tersebut. Dalam melaksanakan kegiatan ini, Kejara Mimpi Padang mengikutsertakan berbagai relawan untuk mengumpulkan dan memilah sampah yang ada di garis pantai. Selain kegiatan pengumpulan dan pemilahan sampah di pantai, Kejara Mimpi Padang juga melaksanakan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan laut dari sampah dan merawat ekosistem laut.

Kegiatan bakti sosial juga dilakukan oleh WAHANA Lingkungan Hidup (WALHI) Sumbar dengan kegiatan bersih-bersih pantai Padang.²⁸ Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan kota Padang bebas dari sampah dan sebelumnya WALHI juga telah mengadakan aksi protes sampah mikro plastik beberapa hari yang lalu. Mereka berharap kegiatan memungut sampah ini ditiru oleh masyarakat lainnya agar membebaskan Kota Padang dari sampah, masyarakat di sekitar pantai belum teredukasi akan kebersihan sampah. Catatan dari WALHI kepada seluruh golongan masyarakat adalah saatnya mulai dari berpikir kritis, bertindak ramah terhadap lingkungan serta bersama-sama mewujudkan keadilan ekologis dan memastikan tidak adanya eksploitasi lingkungan. Organisasi keagamaan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Jemaat Efrata juga ikut melaksanakan “Gerakan Padang Indah dan Bersih” melalui aksi bersih-bersih pantai.²⁹ Hal ini menunjukkan adanya kepedulian oleh seluruh golongan masyarakat tanpa

²⁸ Yose, Hendra " "Rayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan Bersih-bersih Pantai di Padang" Diakses dari <https://mediaindonesia.com/nusantara/497345/rayakan-hari-lingkungan-hidup-sedunia-dengan-bersih-bersih-pantai-di-padang>

²⁹ koranpadang.com "Aksi Bersih Pantai Padang, GPIB Jemaat Efrata Dapat Apresiasi Pj Wako" Diakses dari <https://koranpadang.com/daerah/aksi-bersih-pantai-padang-gpib-jemaat-efrata-dapat-apresiasi-pj-wako/>

terkecuali dalam menjaga kebersihan laut dan mendorong pembangunan kota Padang.

Masyarakat yang berada di daerah pantai juga menjadi aktor yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan bahwa masyarakat yang mana kebanyakan merupakan pedagang juga mulai berbenah dan mulai sadar atas pentingnya menjaga kawasan pantai bersih dari sampah. Pedagang bergantung terhadap kondisi pantai yang bersih untuk menarik pelanggan agar mau berkunjung ke lapak mereka. Kondisi pantai yang tidak terurus akan mengakibatkan pengunjung enggan datang dan secara langsung mengakibatkan kerugian terhadap pedagang yang ada di kawasan pantai.

Melalui pembahasan di atas dapat diamati bahwa proses kolaborasi antar sesama pemangku kepentingan dalam upaya menyelesaikan permasalahan sampah laut sangatlah penting. *Collaborative governance* mendorong terbentuknya usaha kolaboratif walaupun adanya kepentingan yang berbeda di antara para pemangku kepentingan. Kerja sama ini didasari oleh keresahan yang dirasakan terhadap permasalahan yang mencuat di hadapan bersama. Munculnya upaya berbagai aktor kepentingan terhadap suatu isu sosial merupakan bentuk awal dari *collaborative governance*. Melalui penjelasan di atas dapat diamati bahwa pemerintah bersama dengan swasta dan masyarakat bekerja sama sebagai aktor dalam penyelesaian permasalahan publik, sehingga penelitian ini sesuai dengan menggunakan teori *collaborative governance*. Berdasarkan penjabaran sebelumnya peneliti berasumsi bahwa *collaborative governance* pada pengelolaan sampah laut di daerah pantai kota Padang telah berjalan, namun belum menunjukkan hasil yang optimal. Maka

yang menjadi pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah “Bagaimana proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah laut daerah pantai kota Padang pada tahun 2022-2024”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah laut pada daerah pantai kota Padang pada tahun 2022-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan jadi materi diskusi dalam literatur akademik guna mendalami wawasan terhadap *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah laut di daerah pantai terutama kota Padang. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan dalam menganalisis *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah laut di tingkat provinsi, dan mendorong penelitian lanjutan terkait permasalahan sampah dan juga sampah laut secara umum.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan kepada peneliti lain serta membantu timbulnya pembahasan lainnya mengenai tentang upaya pemerintah dalam mengelola permasalahan sampah di daerahnya dan pembahasan lebih lanjut tentang permasalahan sampah laut.